

**KEBIJAKAN MULTIKULTURALISME KESULTANAN
NGAYOJOKARTO HADININGRAT TAHUN 1998-2014**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

HASBIE AL KAFI

11370093

PEMBIMBING:

Prof. NOORHAIDI HASAN M.A., M.Phil., Ph.D

SIYASAH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk yang diciptakan berbeda-beda dan beragam, dari jenis kelamin, warna kulit, suku bangsa, dan bahasa. Mengingkari perbedaan hakikatnya mengingkari *sunnatullah*. Perbedaan (pluralitas) di satu sisi dapat menjadi kekayaan budaya, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan konflik. Di Indonesia, DIY merupakan kawasan yang mempunyai komposisi masyarakat dengan pluralitas yang kompleks. Pluralitas tersebut harus dikelola dengan benar agar tercipta tatanan masyarakat yang saling mengakui, menghargai dan menghormati. Pengakuan dan dorongan terhadap pluralisme, melindungi keanekaragaman, inilah yang dinamakan multikulturalisme. Dalam hal ini peran pemerintahlah yang sangat vital dalam mendukung multikulturalisme. Sultan Hamengku Buwono X mempunyai peran ganda sebagai Sultan Kesultanan *Ngayogyakarta Hadiningrat* dan sebagai Gubernur DIY. Sebagai Sultan, ia mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kehidupan masyarakat Yogyakarta yang multikultur. Sultan yang terkonsip dari gelarnya *Hamengku* mengandung makna *harengkuh* atau *ngemong*, melindungi dan mengayomi tanpa membedakan golongan, keyakinan dan agama secara adil. Sultan semestinya mampu mengakomodasi pluralitas dan memberikan kebijakan yang bermuatan multikulturalisme. Sebagai Gubernur, ia mempunyai kewenangan sebatas pemeliharaan kerukunan, pemberdayaan umat beragama, dan pengaturan rumah ibadah. Urusan agama merupakan urusan di luar kewenangan Pemerintah Daerah, melainkan kewenangan Pemerintah Pusat.

Jenis penelitian ini adalah *literature research* dan bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian dengan memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang dikaji, yaitu mengenai kasus-kasus kekerasan atas nama agama dan intoleransi, serta kebijakan yang dilakukan oleh Sultan Hamengku Buwono X. Selanjutnya dianalisis bagaimana posisi Sultan apakah sebagai Gubernur DIY atau Sultan Kesultanan serta pandangan dan kebijakan yang Sultan lakukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan Sultan Hamengku Buwono X di berbagai kasus kekerasan atas nama agama dan intoleransi menunjukkan perhatiannya dengan tindakan serta di beberapa kasus mengutarakan *statement* membela multikulturalisme. Meski pada beberapa kasus mendapat perhatian dari Sultan, hal ini tidak menjamin kasus tersebut selesai. Banyak kasus yang mendapat perhatian Sultan yang ternyata tidak selesai secara hukum. Hal ini terjadi karena pada dasarnya kewenangan Sultan Hamengku Buwono X dalam agama hanya sebatas pemberdayaan dan kerukunan umat beragama. Kewenangan agama merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, bukan kewenangan Pemerintah Daerah. Selain itu proses hukum adalah kewenangan aparat keamanan dan dalam hal ini Sultan Hamengku Buwono X tidak mempunyai kekuatan. Dalam berperan menangani kasus kekerasan atas nama agama dan intoleransi, sepertinya Sultan memisahkan peran sebagai Gubernur DIY dan Sultan Kesultanan *Ngayogyakarta Hadiningrat*. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan Sultan yang hanya mengandalkan pihak aparat keamanan dan dengan jalur hukum, tidak menggunakan dialog misalnya

mempertemukan pihak-pihak terkait dan pelibatan Kesultanan *Ngayogyakarta Hadiningrat*.

Kata kunci: Multikulturalisme, Sultan Hamengku Buwono X, Kebijakan



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasbie Al Kafi

NIM : 11370093

Jurusan : Siyasah

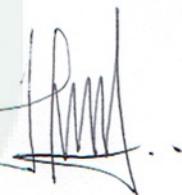
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : KEBIJAKAN MULTIKULTURALISME KESULTANAN
NGAYOJOKARTO HADININGRAT TAHUN 1998-2014

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Desember 2015



Hasbie Al Kafi
NIM. 11370093

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Hasbie Al Kafi

NIM : 11370093

Judul SKripsi : KEBIJAKAN MULTIKULTURALISME
KESULTANAN NGAYOJOKARTO
HADININGRAT TAHUN 1998-2014

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Desember 2015

Pembimbing



Prof. Noorhaidi Hasan MA., M.Phil., Ph.D

NIP: 19711207 199503 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN.02/ 05 /PP.00.9/0576/2015

Skripsi dengan judul : **KEBIJAKAN MULTIKULTURALISME
KESULTANAN NGAYOJOKARTO
HADININGRAT TAHUN 1998-2014**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Hasbie Al Kafi
Nomor Induk Mahasiswa : 11370093
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 21 Desember 2015
Nilai munaqasyah : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Tim Munaqasyah
Ketua Sidang

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP 19711207 199503 1 002

Penguji I

Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji II

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Yogyakarta, 21 Desember 2015

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Sya'riah dan Hukum
DEKAN



Dr. Syafiq Mahmudah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syn	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi

ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mīm	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Wāw	w	w
هـ	Hā’	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Yā’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	‘iddah

C. *Tā’marbūṭah* di akhir kata

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عنة	ditulis	‘illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā’</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-------------	--------	---------	----------

-----○-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Faḥah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. faḥah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2. faḥah + yā' mati تَنَسَّى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati كَرِيم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati فَرُوض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. faḥah + yā' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. faḥah + wāwu mati قَوْل	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِنَشْكُرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal ‘al’

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسِ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذُو الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أَهْلَ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



Motto

Jangan menyerah sebelum mencoba, percaya bahwa Allah tidak akan memberi ujian melebihi batas kemampuan hamba-Nya...

Apa yang terlihat baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah SWT, begitu pula sebaliknya...

Usahakan selalu bersyukur atas apa yang kita miliki...



PERSEMBAHAN

Untuk kedua orang Tuaku,
Yang bersusah payah menyekolahkanku dengan biaya tidak sedikit
Untuk adik-adik dan kakakku,
Yang selalu menjadi motivasi suksesku



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين أشهد أن لا إله إلا الله
و أشهد أن محمدا رسول الله

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, serta kesehatan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Kebijakan Multikulturalisme Kesultanan *Ngayogyakarta Hadiningrat* tahun 1998-2014”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kezaman terang benderang seperti saat ini.

Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Syafiq Hanafi, M.Ag, Selaku Dekan Fak. Syariah dan Hukum.
3. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D, Direktur Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, dan Dosen Penasehat Akademik penulis selama meniti ilmu di Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang juga telah memberikan motivasi kepada penyusun.
4. Bapak Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag, penguji I, dan Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag, penguji II, yang telah berkenan menguji skripsi penyusun, serta memberikan masukan dan penilaian.
5. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Prodi Siyasa, yang selalu memberikan masukan dan kritik membangun dalam kelengkapan skripsi ini.

6. Ibu Siti Jahroh, S.HI, M.Si, dan Bapak R. Sunarya Selaku Sekertaris dan Staff TU Jurusan Siyasa, yang selalu mengingatkan penyusun akan skripsi dan sidang munaqosah.
7. Seluruh Dosen dan Staff di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu mengisi pundi-pundi keilmuan dan berbagi pengalamannya kepada penyusun.
8. Ayahanda Muchlani, Ibunda Puji Hastuti, dan Saudara-saudaraku, kakak tercinta Nurul Yusaefi, adikku Ni'am Al Asy'ari dan Lu'lu Al Fatimi, yang senantiasa memberikan do'a, nasihat, semangat, motivasi, dan untuk semua pengorbanannya memberikan yang terbaik serta keceriaan bagi penulis. Semoga ayahanda dan ibunda selalu diberikan kesehatan dan kami senantiasa dapat membanggakan kalian.
9. Mas Teguh Atmaji beserta keluarga, yang memberikan masukan dan mengingatkan pada penulis terhadap studi yang penulis jalani.
10. Teman-teman Prodi Siyasa, yang senantiasa berbagi keceriaan dan pengalaman serta sharing opini bersama, untuk mendiskusikan tabir keilmuan Politik dan Hukum. Teruntuk: Husyein, Riza, Burhan, Rudi, yang secara khusus meminta namanya dituliskan dalam halaman ini. Dan juga seluruh Mahasiswa Prodi Siyasa angkatan 2011. Semoga kita senantiasa diberikan kesuksesan oleh Sang Pemilik Hidup.
11. Responden penelitian skripsi ini yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 16 Desember 2015



Hasbie Al Kafi
11370093



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PLURALISME SULTAN HAMENGKU BUWONO X.....	16
A. Keistimewaan DIY dan Peran Ganda Sultan Hamengku Buwono X	16
B. Tekad Sultan Hamengku Buwono X dan Yogyakarta.....	22
C. Pandangan Sultan Hamengku Buwono X Terkait Pluralisme	35
1. Makna Pluralisme	35
2. Makna Pluralisme Bagi Sultan Hamengku Buwono X.....	39
BAB III PLURALITAS YOGYAKARTA, MULTIKULTURALISME, DAN KEBIJAKAN SULTAN	

HAMENGKU BUWONO X	43
A. Yogyakarta sebagai Daerah Multikultural.....	43
1. Pluralitas Yogyakarta	43
2. Gerakan Sosial Keagamaan di Yogyakarta	46
B. Kekerasan Atas Nama Agama dan Intoleransi di Yogyakarta tahun 1998-2014	49
C. Kebijakan Sultan Hamengku Buwono X Terkait Kasus Kekerasan Atas Nama Agama dan Intoleransi di Yogyakarta 1998-2014	63
BAB IV KEBIJAKAN MULTIKULTURALISME SULTAN HAMENGKU BUWONO X: PEMIKIRAN DAN REALITAS	79
A. Negosiasi sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sultan Kasultanan <i>Ngayogyakarta Hadiningrat</i>	79
B. Pandangan Sultan Hamengku Buwono X dan Kebijakan Multikulturalisme.....	84
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	94

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Tabel

Tabel 1: Makna gelar yang dimiliki Sultan Hamengku Buwono X secara bahasa.....

26



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang diciptakan berbeda-beda dan beragam, dari jenis kelamin, warna kulit, suku bangsa, dan bahasa. Sejatinya keragaman ini menjadi alat perekat harmonisasi bangunan kebersamaan antar sesama.¹ Oleh karena itu perbedaan merupakan keniscayaan yang mesti dan harus diterima oleh semua orang dalam kehidupannya. Mengingkari keragaman hakikatnya adalah mengingkari *sunnatullah*. Fakta menunjukkan bahwa manusia memang makhluk unik dan khas. Keunikan dan kekhasan ini dalam konteks bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat akan menimbulkan keragaman tatanan sosial dan kebudayaan.² Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut dikenal dengan istilah masyarakat multikultural. Bikhu Parekh mendefinisikan masyarakat multikultural sebagai suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat, serta kebiasaan.³

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman yang sangat kompleks. Sensus penduduk tahun 2010, Badan Pusat Statistik menyatakan jumlah suku di

¹ Said Aqil Shiradj, *Islam Kebangsaan: Fiqh Demokratik Kaum Santri*, cet-1 (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), hlm. 203.

² I Wayan Sukarma, "Multikulturalisme dan Kesatuan Indonesia", <http://www.cakrawayu.org/artikel/8-i-wayan-sukarma/65-multikulturalisme-dan-kesatuan-indonesia.html>, akses 29 Maret 2015.

³ Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism, Cultural Diversity and Political Theory*, alih bahasa C.B. Bambang Kukuh Adi (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 19.

Indonesia yang berhasil terdata sebanyak 1.128 suku bangsa, dengan komposisi 1.072 etnik dan sub etnik. Winda Nuryanti (Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) (2012) mengatakan bahwa hasil penelitian Indonesia memiliki sekitar 743 bahasa. Keragaman di Indonesia juga terdapat dalam pemeluk agama, hasil sensus tahun 2010, 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, 6,96% Protestan, 2,9% Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha, 0,05% Kong Hu Cu, 0,13% agama lainnya, dan 0,38% tidak terjawab atau tidak ditanyakan.⁴ Fakta tersebut menunjukkan betapa beragam dan kompleksnya budaya yang dimiliki bangsa ini.

Secara teori, multi budaya merupakan potensi budaya yang dapat mencerminkan jati diri bangsa. Secara historis, multi budaya telah dapat menjadi salah satu unsur yang menentukan dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, multi budaya juga menjadi modal budaya (*cultural capital*) dan kekuatan budaya (*cultural power*) yang menggerakkan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵ Akan tetapi di sisi lain multi budaya juga berpotensi untuk menimbulkan konflik yang dapat mengancam integrasi bangsa. Karena konflik antar budaya dapat menimbulkan pertikaian antar etnis, antar penganut agama, ras, maupun antar golongan yang bersifat sangat sensitif dan rapuh terhadap suatu keadaan yang menjurus ke arah dis-integrasi bangsa.⁶

⁴ *Sensus Penduduk*, Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik, 2010.

⁵ Johni Najwan, "Konflik Antar Budaya dan Antar Etnis di Indonesia Serta Alternatif Penyelesaiannya," *Jurnal Hukum. Edisi Khusus*, Vol. 16 (Oktober 2009), hlm. 196.

⁶ *Ibid.*, hlm. 196.

Struktur masyarakat Yogyakarta yang sebelumnya secara kultural relatif homogen, secara bertahap berkembang menjadi semakin heterogen, semakin multikultural. Hal ini sesungguhnya merupakan sebuah keniscayaan yang keberadaannya tidak bisa di hindari. Awal mula Yogyakarta menjadi komunitas yang lebih terbuka ialah saat Yogyakarta menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia tahun 1946, di mana pengikut presiden Sukarno ikut pindah ke Yogyakarta. Eksodus dari Jakarta itu memunculkan arus pendatang ke Yogyakarta. Di antara para pendatang baru itu terdapat banyak orang terdidik yang terlibat dalam profesi-profesi modern, termasuk para pejabat pemerintah, personil militer, politikus partai, anggota parlemen, wartawan, akademisi, dan seniman. Karena menjadi ibukota, Yogyakarta menarik aneka macam orang dari begitu banyak kelompok etnis dan kultural Indonesia. Dengan demikian kota Jawa itu menjadi sebuah komunitas yang jauh lebih plural dari sebelumnya. Akibat dari semua perkembangan ini, Yogyakarta pasca-kolonial mengalami nasionalisasi dan kosmopolitanisasi paralel dari komunitas penghuninya.⁷

Keberagaman atau perbedaan apabila dikelola dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik dan unik, namun bila tidak dikelola dengan baik maka akan menghasilkan perpecahan dan konflik. Diperlukan suatu penghargaan kepada setiap perbedaan yang ada, dan justru perbedaan itulah yang membuat sebuah komposisi menjadi kaya dan unik. Diperlukan suatu kerangka interaksi yang dapat mengakomodasi semua perbedaan, mau menerima dan mengakui

⁷ Robert W.Hefner (ed), *Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan*, alih bahasa Bernardus Hidayat, cet 1 (Yogyakarta: Kanisius. 2007), hlm. 207.

keberadaan lainnya, di sinilah arti penting setiap upaya untuk menumbuhkembangkan multikulturalisme sebagai *platform* bersama dan pengawal keutuhan bangsa.

Peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan sangatlah besar terhadap kedamaian suatu masyarakat multikultural. Sebagai contoh, keberhasilan Kanada menerapkan kebijakan multikulturalisme. Kanada merupakan salah satu negara multikultur yang memiliki lebih dari 200 kelompok etnis hidup bersama, dan lebih dari 40 kebudayaan terwakili di dalam media etnis di Kanada, bahkan imigrasi menyumbang 50% pertumbuhan penduduk. Banyaknya ras dan etnis yang terdapat di Kanada mengharuskan pemerintah negara ini untuk dapat mengakomodasi rakyatnya agar tercipta suatu masyarakat yang saling menghargai dan menghormati. Salah satu kebijakan yang saat itu dikeluarkan adalah kebijakan mengenai multikulturalisme yang kemudian disahkan oleh pemerintah federal pada tahun 1971.⁸

Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekaligus sebagai Sultan Kesultanan *Ngayogyakarta Hadiningrat* mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kehidupan masyarakat multikultural. Peranan Sultan sebagai simbol kepemimpinan kharismatik, secara kosmologis⁹ dapat memainkan peranan mediator dari dua kekuatan dan

⁸ http://www.canadainternational.gc.ca/indonesia-indonesie/about-a_propos/multiculturalism-multiculturalisme.aspx?lang=ind, akses 1 Maret 2015.

⁹ Secara etimologi, kosmologi berasal dari perkataan “kosmos” yang berarti dunia, aturan atau alam, dan “logos” yang berarti rasio atau akal. Kosmologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang alam (dunia) akan tetapi, dikatakan bahwa kosmologi merupakan ajaran atau ulasan tentang dunia (Bertens,1985:13).

kekuasaan. Status dan peran Sultan ini terefleksi dalam konsep kekuasaan Islam. Fungsi Sultan Hamengku Buwono di Yogyakarta sebagai mediator kosmologis antara misi kerajaan Islam dengan realitas masyarakat Yogyakarta yang pluralis. Status Sultan dalam Islam sebagai *Khalifatullah fil Ardh Sayyidin Panotogomo* (Wakil Tuhan di Muka Bumi) berfungsi sebagai pemelihara kelanggengan agama.¹⁰ *Sayyidin panotogomo*, ialah pemimpin spiritual keagamaan. Pemegang gelar ini menunjukkan bahwa seorang Sultan sebagai pemimpin dalam menjalankan tugasnya mengembangkan peradaban Jawa berlandaskan syari'at agama dalam hal ini Islam, sebagai agama yang dianut mayoritas masyarakat Jawa.¹¹

Sultan dalam konsep kekuasaan adalah sumber dari segenap kekuatan dan kekuasaan. Ia merupakan "*Kanjeng Sultan Inkgang Sinuwun*", sekaligus panglima perang yang tercermin dalam makna "*Senopati Ing Ngalogo*" dalam melindungi segenap rakyat dan negaranya serta mengantarkan kesejahteraan kepada rakyatnya "*Hamengku Buwono*".¹² Hal ini senada dengan Sultan Hamengku Buwono X, dalam pidato *Jumenengannya* menyampaikan mengenai makna *Hamengku*. *Hamengku* mengandung makna *harengkuh* atau *ngemong*, melindungi dan mengayomi tanpa membeda-bedakan golongan, keyakinan dan agama secara adil. Hakikat *hamengku* identik dengan *ambeg adil pamarata*.¹³

¹⁰ Jawahir Thontowi, *Apa Istimewanya Yogya* (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007), hlm. 10.

¹¹ Arwan Tuti Artha, *Laku Spiritual Sultan: Langkah Raja Jawa Menuju Istana* (Yogyakarta: Galangpress, 2009), hlm. 49.

¹² Heru Wahyukismoyo, *Keistimewaan vs Demokratisasi* (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2004), hlm. 46.

¹³ *Ibid.*, hlm. 50.

Sultan dalam konsep kultural dan spiritual menyadari bahwa dirinya hanyalah makhluk Allah, akan tetapi ia memiliki kelebihan “*daya linuwih*” sebagai “*khalifatullah fil ardh*” dan menjadi suri tauladan bagi rakyatnya dalam mengantarkan kehidupan yang sejahtera berdasarkan agama sebagaimana tercermin dalam gelar “*Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah*”.¹⁴

Oleh karena itu, Sultan semestinya mampu menjaga pluralitas dan mengeluarkan kebijakan yang bermuatan multikulturalisme untuk menjaga pluralitas yang ada di Yogyakarta. Leo Suryadinata mendefinisikan multikulturalisme sebagai pengakuan dan dorongan terhadap pluralisme, multibudaya menjunjung tinggi dan berupaya untuk melindungi keanekaragaman. Pada saat yang bersamaan memfokuskan diri pada hubungan budaya minoritas dengan budaya mayoritas yang sering kali tidak seimbang.¹⁵ Tidak berbeda jauh dari definisi Leo Suryadinata, menurut Will Kymlicka, multikulturalisme dapat dimengerti sebagai pengakuan terhadap keragaman atau keanekaragaman budaya dan etnis, yang menumbuhkan kepedulian untuk mengupayakan agar kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat, dan kelompok mayoritas bersedia mengakomodasinya dengan tetap mengakui identitas minoritas.¹⁶

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang kebijakan Multikulturalisme Kesultanan *Ngayogyakarta Hadiningrat* tahun 1998-

¹⁴ Heru Wahyukismoyo, *Keistimewaan...*, hlm. 46.

¹⁵ Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia* (Jakarta: Kompas: 2010), hlm. 224.

¹⁶ Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural, Teori Liberal mengenai Hak-hak Minoritas*, alih bahasa F Budi Hardiman (Jakarta: LP3ES Indonesia, 2002).

2014, khususnya berkaitan dengan kekerasan atas nama agama dan intoleransi yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi di Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikembangkan dan dicari jawaban dalam penelitian ini adalah:

1. Apa makna pluralisme bagi Sultan Hamengku Buwono X?
2. Bagaimana Sultan Hamengku Buwono X menegosiasikan antara posisi sebagai Sultan Kesultanan *Ngayogyakarta Hadiningrat* dan sebagai Gubernur DIY dalam mengeluarkan suatu kebijakan multikulturalisme?
3. Bagaimanakah kebijakan multikulturalisme Sultan Hamengku Buwono X dalam pengakuan terhadap masyarakat multikultur?

C. Tujuan dan Kegunaan

Selaras dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah tertulis di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan terkait pemikiran Sultan Hamengku Buwono X mengenai pluralisme.
2. Untuk menjelaskan posisi Sultan Hamengku Buwono X dalam mengeluarkan suatu kebijakan yang bermuatan multikulturalisme, antara seorang Sultan Kesultanan *Ngayogyakarta Hadiningrat* dan seorang Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, atau menegosiasikan keduanya.

3. Untuk menjelaskan bagaimana Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan kebijakan pengakuan terhadap masyarakat multikultur, dalam hal ini ialah wilayah Yogyakarta.

Penelitian ini juga dapat memberikan beberapa kegunaan. Kegunaan dari penelitian ini ialah antara lain:

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terkait pandangan dan pemikiran Sultan Hamengku Buwono X tentang pluralisme dan multikulturalisme.
2. Untuk melengkapi penelitian terkait Sultan Hamengku Buwono X serta kebijakannya.
3. Untuk memberikan gambaran kebijakan Sultan Hamengku Buwono X dalam pengakuan masyarakat multikultur, dalam hal ini adalah Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian tentang “*Kebijakan Multikulturalisme Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tahun 1998-2014*”, penyusun telah berusaha melakukan penelusuran karya-karya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, baik dalam bentuk buku, jurnal, makalah ilmiah, artikel dan lain sebagainya.

Pertama, buku berjudul “*Politik Multikulturalisme, Menggugat Realitas Kebangsaan*” yang dieditori oleh Robert W. Hefner. Buku ini memotret kehidupan masyarakat pluralis di tiga negara majemuk di Asia Tenggara, yakni

Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Menurut R.W. Hefner, perkembangan multikulturalisme di Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengalami semacam transisi kultural dari masa kolonial ke pasca-kolonial. Adanya transisi kultural itu, mengindikasikan bahwa perkembangan pluralitas dalam masyarakat di tiga negara tersebut sangat pesat. Di samping itu intervensi kekuasaan (negara) terhadap kewarganegaraan turut mempengaruhi lahirnya isu-isu etnisitas dan etnoreligius. Kekuasaan Lee Kuan Yew (Singapura), Mahatir Muhammad (Malaysia), dan Suharto (Indonesia), melahirkan isu etnisitas dan etnoreligius berbeda-beda.¹⁷

Kedua, artikel karya Azyumardi Azra yang berjudul “Identitas dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme Indonesia”. Tulisan ini membahas disintegrasi kebudayaan pasca runtuhnya Orde Baru, krisis moneter, politik dan ekonomi mengakibatkan pula krisis sosio kultural. Selain sebab-sebab tersebut, globalisasi juga mempunyai peranan terhadap disintegrasi yang terjadi di Indonesia pasca Orde Baru. Ia berpendapat bahwa salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah dengan pendidikan multikultural yang berlandaskan Bhineka Tunggal Ika. Namun untuk Indonesia masih banyak memerlukan pembahasan yang serius, juga pengimplementasian yang efektif.¹⁸

Ketiga, tulisan Achmad Fedyani Syaifuddin yang berjudul “*Membumikan Multikulturalisme Di Indonesia*”. Tulisan ini membahas konsep multikulturalisme dan menghubungkan dengan konsep kompleksitas peradaban dan budaya di

¹⁷ Robert W. Hefner (ed), *Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan*, alih bahasa Bernardus Hidayat, cet 1 (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

¹⁸ Azyumardi Azra, *Identitas dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme Indonesia*. <http://snb.or.id/article/14/identitas-dan-krisis-budaya-membangun-multikulturalisme-indonesia>, akses 19 Maret 2015.

Indonesia, konsep negara bangsa, tren global, dan juga dengan konflik agama. Di dalam tulisan ini juga dibahas mengenai konsep multikulturalisme yang seharusnya menjadi pendekatan dan sebagai kebijakan nasional.¹⁹

Keempat, sebuah hasil penelitian yang ditulis oleh Tri Ratnawati yang dimuat dalam *Jurnal Governance*, berjudul “Antara ‘Otonomi’ Sultan dan ‘Kepatuhan’ pada Pusat di Era Reformasi: Study Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”. Karya ini membahas mengenai peran Sultan Hamengku Buwono X sebagai Raja Yogyakarta serta Gubernur Provinsi DIY pada era Reformasi. Dalam tulisan ini dikemukakan bahwa Sultan cenderung lebih menonjol kekuasaan dan posisinya sebagai alat daerah ketimbang sebagai alat Pemerintah Pusat. Posisi Sultan sebagai penguasa tradisional (raja), sangat mendukung kekuasaannya sebagai birokrat (gubernur), di tengah-tengah masyarakat Yogya yang sebagian masih paternalistik (terutama yang tinggal di perdesaan).²⁰ Tulisan ini hanya membahas terkait administrasi dan birokrasi, tidak menyentuh tentang tema yang penulis ambil.

Dari beberapa karya ilmiah yang telah saya cantumkan di atas, belum satu pun tulisan atau penelitian membahas mengenai Kebijakan Multikulturalisme Kesultanan *Ngayogyakarta Hadiningrat* tahun 1998-2014.

¹⁹ Achmad Fedyani Syaifuddin, Membumikan Multikulturalisme di Indonesia *Jurnal Antropologi Sosial Budaya Etnovisi*. Vol II, No 1 (2006).

²⁰ Tri Ratnawati, “Antara ‘Otonomi’ Sultan dan ‘Kepatuhan’ pada Pusat di Era Reformasi: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Pascasarjana: Governance*, Vol 2, No 1 (2011), hlm 43-68.

E. Kerangka Teoritik

Widodo mengutip Dye menyatakan kebijakan publik diartikan sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*” (apa pun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu).²¹

Widodo mengutip Kartasmita mengemukakan bahwa : “Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan, atau tidak lakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah (*what government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs*).”²²

George C. Edwards III dan Ira Sharkansky juga menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan:

Apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.²³

Kedua definisi baik dari Dye dan Edwards III dan Sharkansky sama-sama menyetujui bahwa kebijakan publik juga termasuk juga dalam hal “keputusan untuk tidak melakukan tindakan apapun”. Suwitri memberi contoh bahwa keputusan pemerintah untuk menunda pelaksanaan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi sehingga dalam hal ini pemerintah tidak melakukan

²¹ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Malang: Bayumedia Publising, 2012), hlm. 12.

²² *Ibid.*, hlm. 12.

²³ Sri Suwitri, *Konsep Dasar Kebijakan Publik* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009), hlm. 9.

tindakan apapun untuk menjalankan Undang-Undang tersebut juga termasuk kebijakan publik.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memfokuskan pada usaha menggali nilai-nilai atau hakikat yang terkandung dalam suatu fenomena sosial.²⁵ Di mana yang dihasilkan adalah data-data deskriptif berupa kata-kata atau kalimat-kalimat tertulis.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian dengan memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang dikaji, yaitu mengenai kasus-kasus kekerasan atas nama agama dan intoleransi serta tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh Sultan Hamengku Buwono X, selanjutnya dianalisis bagaimana posisi Sultan Hamengku Buwono X dalam tindakan dan kebijakan yang seharusnya sesuai dengan Gelar yang dimiliki dalam menanggapi kasus-kasus tersebut.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologi sosial. Di mana kondisi masyarakat Yogyakarta yang

²⁴ *Ibid.*, hlm 11.

²⁵ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke 4 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

multikultural. Namun pada masa reformasi, Yogyakarta yang dikenal sebagai *city of tolerance* terjadi kasus-kasus kekerasan atas nama agama dan intoleransi. Kemudian hal tersebut dikaitkan dengan gelar Sultan Hamengku Buwono X dimana Sultan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kerukunan dan pengakuan terhadap masyarakat yang multikultur.

4. Teknik Pengumpulan data

Data yang akan dicari adalah tentang kebijakan multikulturalisme Sultan Hamengku Buwono X dalam menjaga kerukunan dan pengakuan terhadap masyarakat yang multikultural, khususnya terhadap minoritas yang menjadi korban kekerasan atas nama agama dan intoleransi. Adapun data tersebut dicari dengan menggunakan:

a) Studi Literatur

Metode literatur adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil data-data yang diperlukan dari literatur-literatur atau bahan pustaka yang berkaitan. Bahan pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition*, seperti buku, *ebook*, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, buletin, jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah, internet, teks pidato dan lain-lain.

b) Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Maksudnya ialah proses memperoleh data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab tatap muka antara

pewawancara dengan responden.²⁶ Orang yang penulis wawancarai ialah, *pertama*, Hafizen, Koordinator Program Islam dan Gender Yayasan LkiS. Hafizen ini juga termasuk aktifis yang aktif dalam advokasi minoritas seperti agama di luar Islam, serta golongan keagamaan seperti Syi'ah, dan Ahmadiyah. *Kedua*, M. Rukh, anggota Yayasan Rausyan Fikr.

5. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, baik primer maupun sekunder, data-data tersebut akan dianalisis dengan model analisis induktif. Analisis induktif berpijak pada data-data sebagai langkah awal yang kemudian akan diteliti dengan tujuan mendapatkan hasil berupa kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka perlu disusun sistematika pembahasan. Bab pertama, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menerangkan keistimewaan DIY dan peran ganda Sultan Hamengku Buwono X, tekad Sultan Hamengku Buwono X terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian pandangan Sultan Hamengku Buwono X terkait Pluralisme.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 128.

Bab ketiga, berisi gambaran masyarakat multikultural di Yogyakarta. Kemudian pemaparan kekerasan yang mengatasnamakan agama dan intoleransi di Yogyakarta tahun 1998-2014. Serta kebijakan yang dilakukan oleh Sultan Hamengku Buwono X dalam merespon kejadian tersebut.

Bab keempat, adalah analisis kebijakan multikulturalisme Sultan Hamengku Buwono X. Ada dua pembahasan yang dianalisis, yaitu pertama posisi Sultan dalam mengeluarkan kebijakan, apakah sebagai seorang Sultan Kesultanan *Ngayogyakarta Hadiningrat*, atau sebagai seorang Gubernur DIY. Yang kedua ialah pemikiran Sultan terkait pluralisme dan realitas yang dilakukan oleh Sultan Hamengku Buwono X terkait kebijakannya dalam mendukung multikulturalisme.

Bab kelima, merupakan penutup dari tulisan ini. Penulis akan membuat suatu kesimpulan yang diambil dari analisis di bab sebelumnya dan menjadi jawaban atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Selain itu penulis juga memuat saran-saran yang mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran mengenai problematika yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, yaitu sebagai berikut.

A. Kesimpulan

Sultan Hamengku Buwono X memandang pluralisme sebagai kebhinekaan yang harusnya dipandang sebagai unsur perekat dan kekuatan bangsa. Bukan sebaliknya yang sering terjadi menjadi kelemahan yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian dalam mengelola pluralisme menurutnya diperlukan kerjasama semua pihak, pemerintah, tokoh agama dan masyarakat harus bahu-membahu berupaya menjaga pluralisme agar tidak terjadi konflik. Tokoh agama yang berupaya untuk saling dialog publik antar agama agar tercipta kerukunan, serta peran pemerintah lah yang sangat vital sebagai pembuat kebijakan.

Secara umum kebijakan pengakuan terhadap keberagaman oleh Sultan sesuai dengan amanat undang-undang, sesuai dengan salah satu tekadnya yaitu untuk tidak melanggar *paugeran* negara. Hal ini mengisyaratkan bahwa Sultan mendukung pluralisme dan multikulturalisme. Sultan memberikan kebebasan kepada masyarakatnya seperti kebebasan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan perayaan keagamaan. Dari masyarakat Yogyakarta, pengakuan terhadap perbedaan relatif baik terlihat dari kebebasan masyarakat menyelenggarakan ritual

dan acara keagamaan. Namun dalam prakteknya ada saja ormas garis keras yang tidak toleran, melakukan kekerasan atas nama agama dan intoleransi. Dan tidak jarang dari ormas tersebut yang memprovokasi masyarakat untuk melakukan intoleransi seperti pelarangan pendirian rumah ibadah dan kekerasan atas nama agama.

Sejatinya Sultan Hamengku Buwono X telah berusaha untuk selalu aktif dalam membela pluralisme dan multikulturalisme. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kesempatan Sultan turut menghadiri berbagai acara keagamaan, baik Islam ataupun agama lain. Selain itu Sultan sering mengeluarkan *statement* ketika di wilayah DIY terjadi berbagai kasus intoleransi dan kekerasan atas nama agama atau dan bisa dikatakan kebijakan multikulturalisme. Sultan juga beberapa kali ikut andil dalam menyelesaikan persoalan keagamaan. Namun dalam hal ini kewenangan Sultan Hamengku Buwono X dibatasi oleh undang-undang, di mana kewenangan agama sejatinya menjadi kewenangan Pemerintah. Hal lain yang tidak bisa di sentuh oleh Sultan Hamengku Buwono X ialah hukum dan proses peradilan. Dan yang sering terjadi di DIY ialah kasus yang pengusutannya tidak tuntas.

Dalam menangani kekerasan atas nama agama dan intoleransi, Sultan tidak serta merta mengerahkan atau melibatkan kesultanan. Hal ini mengindikasikan peran Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY bukan sebagai Sultan Kesultanan *Ngayogyakarta Hadiningrat*. Tampaknya Sultan jarang melakukan sesuatu/kebijakan sebagai Sultan Kesultanan, hal ini sepertinya juga dilakukan

oleh Sultan Hamengku Buwono IX di mana menurut Heru Wahyukismoyo, peran Sultan Hamengku Buwono IX sebagai pejabat kultural hanya pada perayaan Kultural Keraton seperti Maulid Nabi, Sekaten dan sebagainya.

B. Saran

Pemerintah Daerah harus lebih aktif dalam menjaga dan mengupayakan terciptanya perdamaian dan toleransi antar agama. Selain itu aparat keamanan harus lebih aktif dalam menangani kasus-kasus kekerasan atas nama agama dan intoleransi. Serta penanganannya harus sampai tuntas dan selesai, karena selama ini banyak kasus-kasus kekerasan atas nama agama dan intoleransi yang tidak selesai secara hukum dan tidak tuntas. Pemegang kunci perdamaian sesungguhnya terletak pada pemangku kebijakan di tingkat lokal, baik itu pemerintah daerah maupun aparat keamanan setempat, karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat, yang hidup berdampingan dengan masyarakat, dan paling pertama yang mendengarkan suara masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.

B. Fiqih, Hukum Islam, Islam

Ch, Anshoriy dan Nasruddin, *Matahari Pembaruan: Rekam Jejak K.H Ahmad Dahlan*, Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2010.

Djazuli, A, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 60.

Dermawan, Andi, *Dialektika Islam dan Multikulturalisme di Indonesia: Ikhtiar Mengurai Akar Konflik*, Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta, 2009.

Hasan, Noorhaidi, *Islam Politik di Dunia Kontemporer: Konsep, Genealogi, dan Teori*, Yogyakarta: Suka Press: 2012.

Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, edisi 1 cet-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Shiradj, Said Agil, *Islam Kebangsaan: Fiqh Demokratik Kaum Santri*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.

Syam, Nur, *Tantangan Multikulturalisme Indonesia, Dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Thoha, Anis Malik, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*, Jakarta: Gema Insani, 2005.

Yusuf, M.Yunan, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2005.

C. Hukum, Sosial, Politik

Artha, Arwan Tuti, *Laku Spiritual Sultan: Langkah Raja Jawa Menuju Istana*. Yogyakarta: Galangpress, 2009.

Atmakusumah-pen, *Tahta Untuk Rakyat, Celah-Celah Sultan Hamengku Buwono IX* Jakarta: Gramedia, 1982.

- Baskoro, Haryadi dan Sudomo Sunaryo, *Catatan perjalanan keistimewaan jogja: menurut Sejarah, Mencerminkan Perubahan, Menggagas Masa Depan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Robert Endi, Jaweng (ed), *Kompilasi Undang-Undang Otonomi Daerah dan Sekilas Proses Kelahirannya*, Jakarta: ILD-TIFA, 2004.
- Hamengkubuwono X, Sri Sultan, *Merajut Kembali Keindonesiaan Kita*, Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Haryanto, Sindung, *Dunia Simbolik Orang Jawa*, cet-1, Yogyakarta: Kepel Press, 2013.
- Hasrullah, *Dendam Konflik Poso periode 1998-2001 : konflik Poso dari perspektif komunikasi politik*, Jakarta: Gramedia: 2009.
- Hefner, W.Robert (ed), *Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan*, alih bahasa Bernardus Hidayat, cet 1 Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Jandra, *Model Kehidupan Bermasyarakat dalam Khasanah Budaya Kraton Yogyakarta*, Yogyakarta: YKII-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Kymlicka, Will, *Kewargaan Multikultural, Teori Liberal mengenai Hak-hak Minoritas*, terj F. Budi Hardiman, Jakarta:LP3ES Indonesia, 2002.
- Margontoro, Y.B, *Sri Sultan Hamengkubuwono X: Meneguhkan Tahta untuk Rakyat*, Yogyakarta: PT Grasindo, 1999.
- Moedjanto, G, *Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman: Tinjauan Historis Dua Paraja Kejawen 1755-1992*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Moedjanto, G, *Konsep Kekuasaan Jawa, Penerapannya oleh Raja-raja Mataram*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Molan, Benyamin dkk, *Multikulturalisme: Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*. Jakarta: Indeks, 2009.
- Parekh, Bikkhu, *Rethinking Multiculturalism, Cultural Diversity and Political Theory*, alih bahasa oleh C.B. Bambang Kukuh Adi, Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke 4, Bandung: Alfabeta, 2013.

- Reid, Anthony J.S, *Revolusi Nasional Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, Jakarta: 1996.
- Sensus Penduduk, Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik, 2010.
- Subkhan, Imam, *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme Yogya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Suryadinata, Leo, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*, Jakarta: Kompas: 2010.
- Suwitri, Sri, *Konsep Dasar Kebijakan Publik*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009.
- Tim Penulis, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan dan Intoleransi 2013*, Jakarta: The Wahid Institute, 2013.
- Tim Penulis, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan dan Intoleransi 2014: 'Utang' Warisan Pemerintahan Baru*, Jakarta: The Wahid Institute, 2014.
- Tim Penyusun, *Lampu Merah Kebebasan Beragama: Laporan Kebebasan Beragama dan Toleransi di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institute, 2011.
- Tim Penyusun, *Laporan Akhir Tahun dan Kebebasan Beragama dan Intoleransi 2012 The Wahid Institute* , Jakarta: The Wahid Institute, 2012.
- Tim Penyusun, *Laporan Tahunan The Wahid Institute Tahun 2008 Pluralisme Beragama: Berkeyakinan di Indonesia: Menapaki Bangsa Yang Kian Retak*, Jakarta: The Wahid Institute, 2008.
- Thontowi, Jawahir, *Apa Istimewanya Yogya*, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007.
- Wahyukismoyo, Heru, *Merajut Kembali Pemikiran Sultan Hamengkubuwono IX*. Yogyakarta: Dharmakaryadhika Publisher, 2008.
- Wahyukismoyo, Heru, *Keistimewaan vs Demokratisasi*, Yogyakarta: Bigraf Publising, 2004.
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang: Bayumedia Publising, 2012.
- Wignosubroto, Soetandyo, dkk. *Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Jakarta: ILD-TIFA, 2005.

Yusra, Abrar, *Komat Kamit Selo Soemardjan: Biografi , Reminiscenses of Selo Soemardjan: A Biography*, Jakarta: Gramedia, 1995.

D. Jurnal

Cornelis Lay, “Kekerasan Atas Nama Agama: Perspektif Politik,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 13, No 1, (Juli 2009).

Achmad Fedyani Syaifuddin, “Membumikan Multikulturalisme di Indonesia” *Jurnal Antropologi Sosial Budaya Etnovisi*. Vol II, No 1 (2006).

Johani Najwan, “Konflik Antar Budaya dan Antar Etnis di Indonesia Serta Alternatif Penyelesaiannya. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII*. Edisi Khusus Vol. 16, (Oktober 2009).

Jurnal Pascasarjana: Governance “Antara ‘Otonomi’ Sultan dan ‘Kepatuhan’ pada Pusat di Era Reformasi: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta. Vol 2, No 1 (2011).

Maria Ulfa, “Mencermati Inklusivisme Agama Nurcholish Madjid”, *Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam ‘Kalimah’* Vol 11 No 2 , (September 2013).

Philip J Vermonte dan Tobias Basuki, *Masalah Intoleransi, Toleransi, dan Kebebasan Beragama di Indonesia*, Jurnal Ma’arif Institute, Vol VII No 1 Tahun 2012.

E. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang RI No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006/ Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

F. Koran/ Majalah

Faisal Ismail, "Apa yang salah dengan pluralisme agama?," *Koran Sindo*, (7 Februari 2014).

G. Wawancara

M. Rukh, Anggota Yayasan Rausyan Fikr, 30 April 2015.

Hafizen, Aktivistis dan Anggota LkiS, 15 Oktober 2015.

H. Makalah

Bambang Budiono, makalah HAM dan Multikulturalisme, dipresentasikan sebagai bahan kuliah Matrikulasi Pasca Sarjana Media dan Komunikasi Fisip Universitas Airlangga, 7 September 2012.

I. Website

Azyumardi Azra, Identitas dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme Indonesia. <http://snb.or.id>, akses 19 Maret 2015.

http://www.canadainternational.gc.ca/indonesia-indonesie/about_a_propos/multiculturalism-multiculturalisme.aspx?lang=ind, akses 1 Maret 2015.

<http://www.frontjihadislam.or.id>, akses 23 April 2015.

I Wayan Sukarma, "Multikulturalisme dan Kesatuan Indonesia", <http://www.cakrawayu.org>, akses 29 Maret 2015.

<http://www.ui.ac.id>, akses 26 April 2015

http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/72845-Syiah_Korban_%5C, akses 23 April 2014.

<http://jogja.polri.go.id>, diakses 28 April 2015.

<http://www.jogjaprov.go.id/>, akses 26 April 2015.

<http://nasional.news.viva.co.id>, akses 26 April 2015.

<http://crcs.ugm.ac.id>, akses 26 Agustus 2015.

<http://www.satuislam.org>, diakses 27 April 2015.

<http://jogja.solopos.com>, akses 26 April 2015.

<http://www.spdi.eu>, akses 26 April 2015.

<http://targetabloid.co.id>, akses 7 Juni 2015.

<http://jogja.tribunnews.com>, akses 27 April 2015.

<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>, akses 11 September 2015

<http://pmkri.or.id/sejarah-pmkri/>, akses 1 Oktober 2015

<http://www.politikindonesia.com/index.php?k=pendapat&i=34480-Pluralisme-Hasil-Negosiasi-Politik,-Rapuh>. Akses 26 April 2015.

<http://www.tribunnews.com>



DAFTAR TERJEMAHAN

No	Halaman	BAB	FN	Terjemahan
1	38	II	58	Bagimu agamamu dan bagiku agamaku
2	65	III	114	Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”, mereka (malaikat) berkata: “Apakah Engkau akan jadikan di atas bumi ini orang-orang yang merusak kepadanya dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih dengan memujiMu?” Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

CURRICULUM VITAE

Nama : Hasbie Al Kafi
Tempat/Tgl. Lahir : Kebumen, 1 Agustus 1993
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Petanahan, RT/RW 05/02, Kebumen, Jawa Tengah
CP : 083840398173
hasbipethz@gmail.com
Ayah : Muchlani
Ibu : Puji Hastuti
Saudara : Nurul Yusaefi
: Ni'am Al Asy 'ari
: Lu'lu Al Fatimi

Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN 1 Petanahan, 1999-2005
2. MTsN Klirong, 2005-2008
3. SMA Insan Cendekia, Turi, Sleman, 2008-2009
4. MA Salafiyah Wonoyoso, 2009-2011
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011-sekarang